**Efektifitas SAFTA (*South Asia Free Trade Agreement*)
Dalam Meningkatkan Liberalisasi Perdagangan Intra-
Kawasan SAARC (*South Asian Arrangement Of
Regional Cooperation*)**

Dilika Putri^{1*} & Pazli^{2*}
Email: putridilika@yahoo.com

Abstract

This research of this thesis is aimed to recognize the obstacles which are cause the failure of SAFTA in SAARC economy integrating process. The purpose of this thesis more specifically can be seen such as: 1. Describing the failure of SAFTA in improving the intra-regional trading liberalitation of SAARC in 2007-2010. 2. Describing the obstacles of improving the intra-regional trading liberalitation of SAARC. In spite of South Asia free trade cooperation by South Asian Preferential Trade Agreement (SAPTA) in 1995 and South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) in 2006, there is still low percentage of intra-regional trade, especially export volume, compared with their total world export. However, its ratio percentage was 4-6% , whereas Eropa Union was 57-65%, ASEAN was 22-25%, and NAFTA was 48-55% within 2000-2010. The main cause is the incomplementary of their products export both in economy and political perspective. It means that they yield the similiar products, in particularly textile products, so that they have to relocate and sell their export products to outside regional countries, such as United States and Eropa Union, instead of making trade with SAARC members.

Keywords: *SAARC, SAPTA, SAFTA, incomplementary of their products, industrial policy, and trade policy*

Pendahuluan

Kawasan Asia merupakan salah satu kawasan yang kemajuan tingkat ekonomi negara-negara di dalamnya menjadi sorotan dunia sejak tahun 1990-an. Ada beberapa negara yang muncul menjadi macan Asia, seperti Jepang, China, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, India, bahkan Indonesia. Negara-negara tersebut berasal dari regional Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara yang di dalamnya terdapat masing-masing organisasi regional. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara menjadi kawasan yang paling maju dalam hal pertumbuhan ekonomi, terlihat dari total GDP, GNP, dan tingkat perdagangan intra-kawasannya ditambah dengan diadakannya liberalisasi perdagangan dalam kawasan tersebut.

^{1*} Alumni mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.

^{2*} Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.

Sebaliknya, kemajuan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah cenderung tidak terlihat, walaupun ada organisasi yang ditujukan untuk memperkuat kerjasama ekonomi.

Penelitian tentang negosiasi melalui kerjasama (regional)³ menjadi suatu hal yang penting, khususnya mengenai regionalisme ekonomi. Usaha liberalisasi regional untuk meningkatkan kesaling-tergantungan, antara negara dalam satu kawasan, banyak berlangsung pada tahun 1990-an, seperti halnya pembentukan kawasan perdagangan NAFTA di Amerika Utara, AFTA di Asia Tenggara, SAFTA di Asia Selatan, dan kerjasama lainnya. Organisasi ini berfungsi sebagai sarana untuk mengartikulasikan kepentingan nasional negara anggotanya, seperti kesejahteraan bagi anggota-anggotanya karena melalui kesepakatan perdagangan bebas tersebut membuat negara-negara kecil berusaha untuk mem-spesialisasikan produk di negaranya sehingga ia mampu bersaing dengan negara lain di kawasan itu.

Para pemimpin negara anggota SAARC juga telah setuju untuk mempercepat perdagangan bebas dengan menyepakati mekanisme SAFTA yang mulai beroperasi tahun 2006. Selain itu, para akademisi juga menyarankan agar SAARC meningkatkan bilateral dengan kerangka regional terhadap komoditas-komoditas yang terpilih lalu meningkatkan sistem keseluruhan kawasan. Serta menarik dana asing dan investasi luar untuk mendorong produksi dalam negara-negara tiap-tiap anggota SAARC sehingga perdagangan intra-kawasan akan meningkat. Contoh bantuan dana dari IMF, WTO, dan lembaga lainnya.

Demikian usaha kerjasama regional, melalui integrasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan untuk menghasilkan spesialisasi produksi seperti argumen kaum liberal telah dilaksanakan. SAPTA (South Asian Preferential Trade Agreement) telah beroperasi secara sah pada bulan Desember 1995, namun signifikansi dari kesepakatan itu belum terlihat dalam perubahan positif neraca (nilai volume) perdagangan kawasannya. Pada awal 2004, negosiasi telah berkembang ke titik bahwa perjanjian SAFTA ditandatangani oleh para pemimpin SAARC di Islamabad pada tanggal 6 Januari 2004.⁴ Usaha dari liberalisasi regional untuk merangsang perdagangan antar negara dalam satu kawasan biasanya dilakukan dengan dengan cara memakai instrumen-instrumen kebijakan perdagangan, seperti menurunkan tarif, termasuk tarif bukan ham-

3 Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner (editor), *The Political Economy of Regionalism*, (New York: Columbia University Press, 1997), hal.3-4.

4 <http://www.saarc.sec.org/data/agenda/economic/safta/SAFTA%20AGREEMENT.pdf>, 07/10/2013 pukul 11.15

batan (non-tariff barriers), mengurangi tingkat intervensi negara terhadap aktivitas ekonomi, perilaku terhadap penanam modal asing, serta mengurangi tingkat kekerasan di wilayah tersebut.

Kenyataan yang terdapat di Asia Selatan adalah kurang terlihatnya signifikansi kenaikan persentase rasio perdagangan intra-kawasan dengan perdagangan ke dunia melalui beberapa usaha kerjasama ekonomi, politik, keamanan, dan dibidang lainnya melalui organisasi SAARC (South Asian Arrangement of Regional Cooperation) yang didirikan pada tahun 1985, terutama dibidang ekonomi dibandingkan dengan beberapa kawasan lainnya. Anggota dari SAARC adalah, India, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Maladewa, dan Afghanistan.

Walaupun ada kesepakatan nyata, namun sebenarnya negara-negara di kawasan Asia Selatan menunjukkan keengganan untuk saling membuka pasar mereka bagi sesama anggota SAARC. Struktur ekonomi di Asia Selatan didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai sekitar sepertiga dari total GDP dan dua pertiga dari total pekerjaan di kawasan tersebut. Sedangkan sektor manufakturnya banyak didominasi oleh tekstil dan pakaian, serta pelaksanaan industri baja, aluminium, petrokimia, dan peralatan lainnya yang sedang dioperasionalisasikan secara besar-besaran saat ini. Sektor jasa juga mewakili pertumbuhan besar dalam perekonomian Asia Selatan.

Pada nyatanya bahwa perdagangan regional di Asia Selatan adalah Negara-negara SAARC ketinggalan dalam hal keterbukaan dalam perdagangan internasionalnya walaupun memang mereka sudah mereformasi kebijakan ekonominya sejak tahun 1990-an, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Hasilnya menyatakan perdagangan intra-kawasan SAARC banyak di pengaruhi oleh ketegangan politik di dalamnya, rejim perdangan proteksionis, serta tingginya volume perdagangan informal.

Dapat disimpulkan, alasan besar mengapa tidak terjadi kenaikan volume perdagangan intra-kawasan Asia Selatan adalah ketiadaan produk kompetitif (berdaya saing tinggi) dari semua negara di Asia Selatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya produktifitas domestik, terutama negara seperti Bhutan, dan Maldives. Produk utama dari negara-negara itu adalah industri tekstil dan pakaian oleh India, Sri Lanka, Bangladesh, dan Pakistan. Terlebih lagi, India menjadi produsen pakaian yang paling kompetitif sehingga banyak negara Asia Selatan yang enggan untuk berdagang dengan India karena akan mengalami *trade imbalance* dalam neraca perdagangannya.

Kawasan itu memiliki tingkat komplemetaritas yang terbatas sehingga membatasi ekspansi perdagangan intra-kawasan di bawah mekanisme perdagangan bebas. Tingginya tingkat daya saing di antara negara itu menghasilkan kecilnya kemungkinan dari keberhasilan perjanjian kawasan tersebut.

Dengan melihat fakta yang telah di paparkan, bisa dikatakan bahwa tingkat perdagangan bebas dengan pertumbuhan ekonomi tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu temuan bahwa perdagangan lebih terbuka dan menyebabkan pertumbuhan lebih cepat. Nampaknya yang terjadi adalah hubungan kausalitas bertentangan dengan asumsi liberal (neoliberal).

Oleh karena itu, yang menjadi rumusan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis adalah **“mengapa *South Asian Free Trade Agreement*(SAFTA) tidak berhasil dalam meningkatkan persentasi perdagangan intra-kawasan *South Asia Aggrement Regional Cooperation*(SAARC) pada tahun 2007-2010?”**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam model analisis dengan cara menganalisis berdasarkan data-data yang ada. Adapun Teknik yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dalam beberapa literature seperti buku jurnal, bulletin, surat kabar, laporan tahunan beberapa instansi terkait, dokumen serta bahan lain yang mendukung penelitian. Penelitian eksplanatif dimaksudkan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu.

Pembahasan

Kerjasama Ekonomi Intra-Kawasan SAARC(*South Asian Arrangement of Regional Cooperation*)

Ditinjau dari segi waktu, Asia Selatan memang jauh ketinggalan dalam melangsungkan konsep kerjasama ekonomi regional yang di mulai pada pertengahan tahun 1980-an, sedangkan kawasan ini baru mempromosikan kerjasama ekonominya pada tahun 1995 melalui sebuah kesepakatan regional. Proposal kerjasama ekonomi kawasan ini dimulai dengan inisiasi pembentukan SAPTA (South Asian Preferential Trade Agreement) kemudian SAFTA (South Asian Free Trade Agreement) dan memang transisi dari ke SAFTA mengalami penundaan yang seharusnya pada tahun 1999 menjadi pada tahun 2004 (final agreement). Walaupun ada kesepakatan nyata, namun sebenarnya negara-negara di

kawasan Asia Selatan menunjukkan keengganan untuk saling membuka pasar mereka bagi sesama anggota SAARC.⁵

Struktur ekonomi di Asia Selatan didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai sekitar sepertiga dari total GDP dan dua pertiga dari total pekerjaan di kawasan tersebut. Sedangkan sektor manufakturnya banyak didominasi oleh tekstil dan pakaian, serta pelaksanaan industri baja, aluminium, petrokimia, dan peralatan lainnya yang sedang dioperasionisasikan secara besar-besaran saat ini. Sektor jasa juga mewakili bagian pertumbuhan besar dalam perekonomian Asia Selatan, yang mencakup industri pertumbuhan tinggi seperti teknologi informasi, khususnya di India. Kawasan ini telah mengalami tanda-tanda peningkatan dalam hal struktur ekonomi selama lima puluh tahun belakangan ini, dimana hasil dari sektor pertanian telah mengalami penurunan mencapai sekitar 20 % dari proporsi GDP, industri jasa telah meningkat sekitar 10 % (mencapai sekitar setengah dari GDP di Asia Selatan), sedangkan sektor manufaktur masih dalam proporsi yang serupa dengan tahun-tahun berikutnya walaupun jenis industri manufaktur memang sudah mengalami diversifikasi menuju barang-barang yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan jumlah sekitar 16% dari GDP yang berasal dari barang manufaktur yang mengalami pertambahan nilai, India, Pakistan, dan Bangladesh telah menjadi negara yang perekonomiannya paling berorientasi kepada industri manufaktur.⁶

Adapun realita perdagangan regional di Asia Selatan, yaitu negara-negara SAARC ketinggalan jika di dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dalam hal keterbukaan perdagangan internasionalnya walaupun memang mereka sudah mereformasi kebijakannya sejak tahun 1990-an. Hasilnya menyatakan perdagangan intra-kawasan SAARC banyak dipengaruhi oleh ketegangan politik di dalamnya, rejim perdagangan proteksionis, serta tingginya volume perdagangan informal.

India merupakan Negara yang memiliki tingkat ekspor yang terbesar di kawasan Asia Selatan, yaitu sebesar 74% yang nilainya adalah 6,901 miliar dollar AS pada tahun 2009, sedangkan nilai ekspor Pakistan pada tahun yang sama adalah sebesar 824,27 juta dollar AS. Oleh karena itu, India dan Pakistan menjadi dua negara pengeksport utama di kawasan SAARC. Dari data impor intra-kawasan itu, Sri-Lanka (sebe-

5 Dushi Weerakon, *Regional Economic Cooperation Under SAARC: Possibilities and Constraints*, dalam Anjum Siddiqui, *India and South Asia: Economic Development in the Age of Globalization*. (New York: M.E Sharpe, Inc, 2007), hal.234

6 Ibid, hal: 19-20

sar 2,987 miliar dollar AS), Bangladesh (2,593 miliar dollar AS), dan India (1,636 miliar dollar AS) menjadi negara pengimpor yang utama di kawasan Asia Selatan tersebut pada tahun 2003-2009.⁷

Terjadi peningkatan ekspor secara tajam pada tahun 2009 dari Pakistan terhadap mitra dagang terpilih di kawasan itu dan SAARC sejak tahun 2003, kecuali dengan Bangladesh. Perdagangan yang sifatnya komplementer antara India dan Pakistan naik dari 13,59% menjadi 20,65% dari tahun 2003 ke tahun 2009, begitu juga dengan Sri Lanka. Namun persentase perdagangan Pakistan dan Bangladesh mengalami stagnasi. Di satu sisi, terjadi penurunan antara data komplementer Pakistan dengan Negara-negara terpilih seperti Bangladesh dan Sri Lanka, walaupun di sisi lain nilai impor barang komplementer Pakistan meningkat dengan India dan SAARC sebagai sebuah kawasan, yaitu dari 43,08% tahun 2003 menjadi 48,73% tahun 2009.⁸

Kelemahan kerjasama perdagangan regional melalui SAARC akan terkikis apabila tiap-tiap negara lebih mengutamakan perdagangan bebas secara bilateral. Contohnya Sri Lanka akan mendukung SAFTA hanya karena menginginkan kemudahan masuk ke pasar India (dalam perjanjian India-Lanka FTA). Kesepakatan bilateral ini akan menjadi paralel seperti kesepakatan dagang lainnya. Hal ini dapat memarginalisasikan SAFTA sebagai kesepakatan dagang regional karena tiap-tiap negara anggotanya akan memilih berdagang secara bilateral dengan anggota lain, bahkan negara-negara di luar kawasan ini.⁹

Selain itu, kelemahan industri di kawasan itu terlihat dari industri manufaktur di Sri Lanka yang fokus terhadap industri barang rendah teknologi, seperti garmen dan tekstil. Industri manufaktur Bangladesh dikhususkan terhadap produk sejenis garmen jadi, kain kapas, makanan laut yang diproses, dan obat-obatan. Sedangkan industri manufaktur India mencakup sektor kunci seperti pakaian, tekstil, baja, aluminium, dan pupuk; sektor industri berteknologi tinggi, mencakup petrokimia, obat-obatan, barang elektronik, serta sepeda-motor. Pakistan memproduksi barang-barang kebutuhan, pertambangan, dan tekstil.¹⁰

7 Mamoon, et.al, "Pakistan Trade Competitiveness and Complementarities in South Asia", *Pakistan Institute of Trade and Development* (9 June 2011), diakses dari http://mpr.ub.uni-muenchen.de/31369/1/MPRA_paper_31369 pada tanggal 20/09/2013 pukul 09.10 WIB

8 Mamoon, et.al, "Pakistan Trade Competitiveness and Complementarities in South Asia, loc. cit

9 Loc.Cit Weerakoon,

10 Op.Cit, Mamoon.

Ketidakberhasilan SAFTA Dalam Meningkatkan Kerjasama Ekonomi Intra-Kawasan SAFTA

Pemberlakuan suatu free trade area merupakan fenomena baru yang menjadi tren dalam sistem internasional terutama untuk kawasan Asia Selatan. Kesuksesan yang diperoleh Uni Eropa dan ASEAN menjadi impian bagi organisasi kawasan lainnya tanpa terkecuali oleh SAARC. Negara-negara yang berada dalam suatu regional memanfaatkan Free Trade Area untuk meningkatkan kerjasama ekonomi.

Komplementaritas Produk yang Rendah

1. Sumber Daya Manusia yang Kurang Terampil dan Terlatih.
Hal ini berhubungan dengan ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, terutama sektor tekstil. Di Bangladesh dan India, sudah ada institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan untuk bekerja di sektor garmen. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat penelitian dan pengembangan produk garmen di tiap perusahaan, contohnya litbang di Pakistan masih disponsori oleh negara bukan bagian strategi perusahaan domestiknya, karena kurang dana.
2. Tingginya Modal dan Infrastruktur yang Kurang Memadai Hal ini disebabkan oleh kekurangan insentif modal, pekerja yang kurang kompeten, ataupun perusahaan yang tidak memiliki visi jangka panjang. Walaupun memang, kedua hal ini menghasilkan ketidakmampuan dari kebanyakan perusahaan (kecil dan menengah) di Asia Selatan untuk melaksanakan inovasi, seperti diversifikasi jenis (variasi) pakaian sehingga lebih kompetitif sehingga tiap negara memiliki ciri khas.
Kekurangan infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, bandara udara, pelabuhan, telekomunikasi dan sarana/prasarana lainnya. Dari keterangan tabel di atas diketahui bahwa sebagian negara di Asia Selatan tidak bisa memperbaiki infrastrukturnya, baik karena tidak ada peran pemerintah yang signifikan atau ide dari pebisnis (Asosiasi Bisnis). Nepal adalah salah satu negara yang pemerintahnya tidak memberikan andil positif terhadap perbaikan infrastruktur dalam mendukung industri domestiknya sehingga membuat asosiasi garmennya (GAN) sendiri yang berinisiatif membuat zona spesialisasi untuk memproses garmen, walaupun ide ini akan dikerjakan bersamasama dengan pemerintah nantinya. Beruntung-

nya deregulasi dalam hal telekomunikasi telah membawa dampak positif terhadap pengembangannya.

3. Tingginya Biaya Transaksi dan Transportasi

Yang juga menjadi kekurangan dalam mekanisme perdagangan bebas SAFTA sehingga mendorong beberapa eksportir kecil untuk lebih memilih perdagangan ilegal (informal) disebabkan, biaya transaksi, dan biaya transportasi. Memang sebagian besar negara anggota SAARC sudah mulai menurunkan tarif hambatan impor negaranya, namun tidak diikuti oleh tiga faktor di atas. Tingginya biaya transaksi, seperti urusan administrasi (official) sehingga membuat para eksportir kecil memilih untuk berdagang secara informal. Begitu juga dengan biaya transportasi, dimana kurang memadainya sistem transportasi dan sistem transit (pengapalan, kereta api, dokumen lambat berjalan, dll), kurangnya jalan penghubungan antarnegara seperti antara India dan Nepal sehingga membuat biaya transportasi menjadi sangat mahal.¹¹

Selain karena alasan di atas, perdagangan informal juga mengembangkan mekanisme kelembagaan yang efisien untuk menegakkan kontrak, arus informasi, pengurangan dan sharing risiko dalam perdagangan. Berbagai studi menyatakan bahwa pedagang-pedagang informal juga menyediakan solusi yang lebih baik untuk menghindari peraturan yang kurang dan tidak efisien melalui jalur perdagangan formal, khususnya dalam penelitian di perbatasan India-Nepal.¹²

Kerangka Kerjasama Negara-Negara Asia Selatan

Sejak tahun 1980-an Bangladesh, pemerintah aktif dalam membina kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan untuk menanamkan modalnya dalam industri tekstil di Bangladesh dan memberikan pelatihan bagi pekerja pabrik tekstil. Selain itu, Bangladesh bekerjasama dengan pemerintah Uni Eropa (skema preferensi EU-GSP melalui Everything but Arm Arrangement/EBA) sehingga memberikan keuntungan untuk memudahkan produk RMG-nya memiliki akses pasar ke Uni Eropa, terutama pasca berakhirnya MFA. Pemerintah Bangladesh menyadari bahwa keberadaannya perlu untuk mengartikulasikan kepentingan nasional bangsanya, terutama dalam hal diplomasi ekonomi.

11 Nisha Taneja, "Informal Trade in SAARC Region", *Jurnal Economic and Political Weekly* vol.36, no.11 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4410401> pada tanggal 6/12/ 2013 pukul 15.23 WIB.

12 Ibid.

Pakistan juga cukup membuka negaranya terhadap mekanisme pasar, walaupun pemerintah masih menetapkan batas intervensi dan batas deregulasi ekonominya. Kebijakan ekonomi terbuka ini menghasilkan kemajuan dalam sektor industrinya, seperti industri tekstil di Pakistan.

Negara Bhutan dan Nepal dapat dikategorikan sebagai negara weak state dengan weak power sehingga sangat bergantung pada negara besar, contohnya India, sebagai mitra dagang utama serta mengandalkan bantuan luar negeri untuk mengembangkan perekonomiannya.

Negara Sri Lanka sangat aktif dalam menjalin kerjasama dengan Negara lain dan mendapat bantuan asing dari AS, India, dan China walaupun Sri Lanka memiliki polugri yang bersifat netral (non-aligned). Keaktifan pemerintah Sri Lanka dalam menjalin kerjasama perdagangan bebas, seperti dengan India dan Pakistan, dan dana bantuan internasional tidak diikuti dengan peningkatan kualitas daya saing industri domestiknya secara bersamaan. Hal ini terbukti bahwa sektor swasta dan bisnis TI kurang dikembangkan di dalam negaranya, walaupun Presiden Mahinda sudah mencetuskan “Pemikiran Mahinda” (Mahinda Chintana) tahun 2005 dan 2010 untuk menuntun kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengembangkan perekonomiannya, mengurangi kemiskinan, dan menjadi negaranya sebagai hub bandara, energi, perdagangan, dan penerbangan dengan membangun infrastruktur serta tidak memprivatisasi sektor-sektor BUMN strategis.

Permasalahan Politik dan Keamanan Negara-negara Anggota SAARC

Permasalahan yang muncul di kawasan tersebut dan kurang terselesaikan dengan baik melalui forum SAARC adalah instabilitas politik yang telah menghasilkan tiga peran antara India dan Pakistan, gerakan separatis di Sri Lanka oleh kelompok Mancan Tamil, ditolaknya sistem demokrasi di Nepal, serta ketidak-stabilan politik Bangladesh. Perang terhadap terorisme di Pakistan dan provinsi perbatasan utara-barat Pakistan, dan belum terselesaikannya masalah Kashmir telah membuat gejolak dan ketidak-stabilan politik di kawasan tersebut.

Ukuran langsung ketidak-stabilan politik ini adalah proporsi pengeluaran militer dalam perekonomiannya yang kira-kira mencapai 2,7 % dari GDP dibandingkan dengan 1% pengeluaran kesehatan, serta 3,7% untuk pendidikan, terutama Negara Pakistan, sehingga terjadi perlombaan senjata antara Pakistan dan India.

Pertama, kebijakan domestik tiap negara yang menyimpang (ti-

dak sinkron) dari kebijakan dalam negeri tiap negara, seperti kebijakan fiskal dalam hal struktur pajak yang tetap tinggi, reservasi yang lazim terhadap 800 jenis produk dari sektor kecil. Hal ini menyebabkan perusahaan besar yang sudah memproduksi produk tersebut tidak dapat meningkatkan kapasitasnya, terutama di negara India, sehingga perusahaan-perusahaan besar India beroperasi di Nepal dan Sri Lanka.

Penyimpangan kebijakan domestik juga mencakup pengaturan harga dalam sistem distribusi publik serta kurangnya subsidi domestik terhadap para produsen domestiknya membuat jalur informal menjadi pilihan untuk mengurangi biaya perdagangan yang tinggi.

Simpulan

Upaya meningkatkan liberalisasi perdagangan SAARC yang dilakukan melalui SAFTA menjadi pilihan bagi negara-negara yang tergabung didalam SAARC tersebut. Pelaksanaan SAFTA untuk mewujudkan pasar bebas dengan upaya menghapus berbagai kendala perdagangan seperti hambatan tarif maupun hambatan non-tarif.

Pada dasarnya SAFTA merupakan langkah awal untuk mewujudkan integrasi ekonomi yang dicita-citakan SAARC meskipun tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN ataupun di Uni Eropa, namun sebagai dasar untuk mewujudkan integrasi ekonomi SAFTA belum efisien. Upaya untuk membentuk pasar tunggal SAARC menghadapi kendala dari permasalahan ekonomi Negara SAARC. Pemerataan ekonomi negara SAARC masih belum terwujud. Kesenjangan ekonomi sangat mencolok di negara-negara SAARC, perbedaan antara negara kaya dan miskin masih sangat terasa, seperti negara India dan Pakistan yang masih mendominasi. Hal ini menjadi permasalahan yang hingga kini masih sangat sulit untuk diselesaikan.

Salah satu kelemahan dari isi perjanjian SAPTA dan SAFTA adalah hanya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-kawasan dan keuntungan bagi penduduknya, tetapi tidak berisi kesepakatan untuk mendorong dan memfasilitasi tiap-tiap negara anggotanya menghasilkan produk kompetitif yang terdiversifikasi secara jenis dan harga. Jika ini disepakati, maka akan menaikkan tingkat komplementaritas produk di kawasan Asia Selatan tersebut sehingga tiap-tiap negara mau untuk saling berdagang dengan sesama anggota SAARC.

Sebaliknya, jika mereka menjual produk yang sama dengan yang dihasilkan oleh negara anggota SAARC lainnya, apalagi dengan negara yang perusahaan domestiknya memakai teknologi dan tenaga yang

berkualitas sehingga produk lebih murah karena efisiensi, seperti India, maka negara penjual akan kalah bersaing dan produk ekspornya tidak laku di pasar regional sehingga harus dijual ke pasar internasional (walaupun akan menjadi lebih mahal karena ditambah dengan biaya ongkos transportasi serta tingginya biaya hambatan tarif di luar kawasan Asia Selatan). Apalagi apabila tingkat konsumsi penduduknya akan produk tersebut juga rendah (termasuk karena alasan jumlah penduduk yang rendah sehingga permintaan pasar domestik menjadi kecil) akan menghasilkan kerugian dalam neraca perdagangan luar negerinya. Selain itu, SAARC perlu untuk menyadarkan tiap negara anggotanya agar tetap mengingat tujuan (goal) dan visi dari pembentukan kerjasama ini sehingga tidak mengaburkan fokus dan kerekatan persahabatan di antara mereka, walaupun tiap-tiap negara terikat dengan berbagai status keanggotaan pada kerjasama bilateral, regional, dan multilateral lainnya. Dengan demikian tujuan dari kerjasama perdagangan bebas (SAPTA & SAFTA), yaitu untuk memperkuat kerjasama ekonomi intra-SAARC guna keuntungan penduduknya, dengan semangat kerjasama, dan penghormatan penuh terhadap kesetaraan kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

- Dushi Weerakon, *Regional Economic Cooperation Under SAARC: Possibilities and Constraints*, dalam Anjum Siddiqui, *India and South Asia: Economic Development in the Age of Globalization*. (New York: M.E Sharpe, Inc, 2007).
- Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner (editor), *The Political Economy of Regionalism*, (New York: Columbia University Press, 1997).
<http://www.saarc.sec.org/data/agenda/economic/safta/SAFTA%20AGREEMENT.pdf>, 07/10/2013 pukul 11.15.
- Mamoon, et.al, “*Pakistan Trade Competitiveness and Complementarities in South Asia*”, *Pakistan Insitute of Trade and Development* (9 June 2011), diakses dari http://mpira.ub.uni/muenchen.de/31369/1/MPRA_paper_31369 pada tanggal 20/09/2013 pukul 09.10 WIB.
- Nisha Taneja, “*Informal Trade in SAARC Region*”, *Jurnal Economic and Political Weekly* vol.36, no.11 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4410401> pada tanggal 6/12/ 2013 pukul 15.23 WIB.